

KONSTITUSIONALITAS PEMBENTUKAN KEBIJAKAN BERBASIS KEPENTINGAN EKONOMI STRATEGIS: MENIMBANG KESEIMBANGAN ANTARA PEMBANGUNAN DAN DEMOKRASI

Iskandar Syukur

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: issyukur@yahoo.com

Abstrak

Penguatan orientasi pembangunan ekonomi dalam penyelenggaraan negara telah mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang menempatkan kepentingan ekonomi strategis sebagai dasar utama dalam penentuan prioritas pembangunan nasional. Kondisi tersebut terlihat dari meningkatnya perhatian terhadap investasi, pembangunan infrastruktur, serta berbagai program strategis yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional. Di sisi lain, semakin dominannya pertimbangan ekonomi dalam pembentukan kebijakan menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusional dan implikasinya terhadap kualitas demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas pembentukan kebijakan berbasis kepentingan ekonomi strategis serta menilai keseimbangan antara tujuan pembangunan dan prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang memanfaatkan berbagai sumber akademik dan hasil penelitian yang relevan dengan tema kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi strategis telah menjadi salah satu faktor dominan dalam penentuan arah kebijakan negara dan program prioritas pembangunan. Namun demikian, konstitusionalitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan mencapai tujuan pembangunan ekonomi, melainkan juga oleh kesesuaian proses pembentukannya dengan prinsip partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan yang berlaku. Oleh karena itu, keseimbangan antara efektivitas pembangunan dan legitimasi demokratis menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang dibentuk tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Kata Kunci: Konstitusionalitas, Kebijakan Publik, Ekonomi Strategis, Pembangunan, Demokrasi.

Abstract

The strengthening of the economic development orientation in state governance has led to the emergence of various policies that place strategic economic interests as the primary basis for determining national development priorities. This is evident in the increased attention paid to investment, infrastructure development, and various strategic programs aimed at supporting economic growth and increasing national competitiveness. On the other hand, the increasing dominance of economic considerations in policy formulation has given rise to debate regarding their compliance with constitutional principles and their implications for the quality of democracy in the governance process. This study aims to analyze the constitutionality of policy formulation based on strategic economic interests and assess the balance between development goals and democratic principles. This study uses a qualitative approach using a literature review method that utilizes various academic sources and research findings relevant to the study's theme. The results indicate that strategic economic interests have become a dominant factor in determining the direction of state policy and priority development programs.

However, the constitutionality of a policy is determined not only by the success of achieving economic development goals but also by the alignment of the formulation process with the principles of public participation, transparency, accountability, and applicable oversight mechanisms. Therefore, the balance between development effectiveness and democratic legitimacy is crucial in ensuring that policies remain aligned with the principles of the rule of law and constitutional democracy.

Keywords: *Constitutionality, Public Policy, Strategic Economics, Development, Democracy.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan kebijakan publik dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya kecenderungan yang semakin kuat untuk menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan negara. Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan investasi, pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, kawasan industri, hilirisasi, serta proyek-proyek strategis nasional disusun dengan orientasi yang diarahkan pada pencapaian target ekonomi yang dianggap mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mulyana, 2020). Dalam praktiknya, orientasi tersebut tidak hanya memengaruhi substansi kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga memengaruhi pola pembentukan kebijakan itu sendiri. Negara semakin dituntut untuk mampu merespons kebutuhan pembangunan secara cepat di tengah persaingan ekonomi global yang semakin ketat, perubahan konfigurasi pasar internasional, serta meningkatnya tuntutan terhadap kemampuan negara dalam menciptakan iklim investasi yang kompetitif. Kondisi tersebut kemudian mendorong lahirnya berbagai instrumen kebijakan yang dirancang untuk mempercepat proses pembangunan, menyederhanakan prosedur birokrasi, dan meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan (Maulana, 2021).

Di sisi lain, semakin kuatnya orientasi pembangunan ekonomi dalam pembentukan kebijakan menghadirkan berbagai persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari aspek ketatanegaraan. Kebijakan yang dibentuk atas dasar pertimbangan ekonomi strategis sering kali melibatkan keputusan-keputusan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, baik dalam aspek sosial, politik, lingkungan, maupun hak-hak warga negara. Dalam sejumlah keadaan, percepatan pembangunan yang dianggap mendesak dapat menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana proses pembentukan kebijakan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang menjadi fondasi penyelenggaraan negara. Perdebatan tersebut semakin relevan ketika kebijakan yang dibentuk atas nama kepentingan pembangunan menghasilkan pembatasan terhadap ruang partisipasi publik, mengurangi intensitas pengawasan, atau mengesampingkan aspirasi kelompok-kelompok masyarakat yang terdampak secara langsung oleh kebijakan tersebut (Kodiyat, 2019).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan kebijakan tidak semata-mata merupakan persoalan administratif yang berorientasi pada pencapaian target pembangunan, melainkan juga berkaitan erat dengan bagaimana kekuasaan negara dijalankan dan dibatasi. Dalam konteks ini, kebijakan ekonomi strategis sering kali ditempatkan sebagai instrumen yang dianggap mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional. Akan tetapi, semakin besar ruang yang diberikan kepada pertimbangan ekonomi dalam menentukan arah kebijakan, semakin penting pula untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas pembangunan dan penghormatan terhadap mekanisme demokrasi menjadi isu yang terus memperoleh perhatian dalam berbagai diskursus ketatanegaraan (Umam, 2019).

Perubahan orientasi kebijakan menuju kepentingan ekonomi strategis juga tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya tekanan terhadap pemerintah untuk menghasilkan capaian

pembangunan yang dapat diukur secara konkret dalam waktu yang relatif singkat. Indikator pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta percepatan pembangunan infrastruktur sering kali dijadikan tolok ukur utama keberhasilan pemerintahan. Akibatnya, berbagai kebijakan yang dinilai mampu mendukung pencapaian target-target tersebut memperoleh prioritas yang tinggi dalam agenda negara. Situasi ini menciptakan kecenderungan di mana proses pembentukan kebijakan lebih banyak diarahkan pada upaya menghilangkan hambatan-hambatan yang dianggap dapat memperlambat realisasi pembangunan. Dalam beberapa keadaan, orientasi tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya pengurangan ruang deliberasi publik yang sebenarnya memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan memperoleh legitimasi yang memadai (Sune, 2019).

Fenomena tersebut semakin terlihat ketika berbagai kebijakan strategis dibentuk dalam suasana yang menuntut kecepatan dan efektivitas pengambilan keputusan. Di satu sisi, pemerintah menghadapi tuntutan untuk memberikan respons yang cepat terhadap berbagai tantangan ekonomi, baik yang berasal dari faktor domestik maupun faktor eksternal. Di sisi lain, masyarakat mengharapkan agar setiap kebijakan yang dibentuk tetap memperhatikan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi. Ketegangan antara kebutuhan akan kecepatan dan kebutuhan akan legitimasi inilah yang kemudian menjadi salah satu isu penting dalam pembentukan kebijakan berbasis kepentingan ekonomi strategis. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan substansi kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga menyangkut proses yang digunakan untuk menghasilkan kebijakan tersebut (Pamungkas & Jakfar, 2022).

Dalam berbagai pengalaman pembentukan kebijakan, kepentingan ekonomi sering kali ditempatkan sebagai alasan utama yang digunakan untuk membenarkan perlunya langkah-langkah tertentu yang dianggap luar biasa. Argumentasi mengenai kebutuhan untuk menarik investasi, meningkatkan daya saing nasional, mempercepat pembangunan infrastruktur, atau mendorong pertumbuhan ekonomi sering kali menjadi dasar bagi lahirnya kebijakan yang membawa perubahan signifikan terhadap pengaturan yang telah ada sebelumnya. Meskipun tujuan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk mencapai kemajuan pembangunan, penggunaan alasan ekonomi sebagai dasar utama pembentukan kebijakan tetap memerlukan pengujian yang cermat. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa setiap kebijakan publik pada akhirnya akan memengaruhi hubungan antara negara dan warga negara, termasuk dalam hal perlindungan hak-hak yang dijamin oleh konstitusi (Maulana, 2019).

Pada saat yang sama, perkembangan lingkungan politik dan ekonomi global telah menciptakan situasi yang semakin kompleks bagi negara-negara berkembang. Persaingan dalam menarik investasi internasional mendorong banyak negara untuk melakukan reformasi regulasi secara besar-besaran. Berbagai kebijakan yang dianggap mampu meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha memperoleh perhatian yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Namun demikian, upaya untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif sering kali berhadapan dengan tuntutan masyarakat agar proses pembentukan kebijakan tetap berjalan secara inklusif dan tidak hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan demokrasi bukanlah dua tujuan yang selalu bergerak dalam arah yang sama, melainkan dapat menghadirkan titik-titik ketegangan yang memerlukan perhatian serius (Sari & Ibrahim, 2023).

Dalam konteks Indonesia, pembahasan mengenai hubungan antara pembangunan dan demokrasi menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan pendekatan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan strategis nasional. Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, pembangunan kawasan industri, investasi, serta proyek-proyek prioritas nasional menunjukkan bahwa negara memiliki kepentingan yang besar untuk mempercepat transformasi ekonomi. Akan tetapi, pada saat yang sama, muncul berbagai kritik yang mempertanyakan sejauh mana proses pembentukan kebijakan tersebut telah

memberikan ruang yang memadai bagi keterlibatan masyarakat. Kritik tersebut tidak selalu ditujukan pada tujuan pembangunan yang hendak dicapai, melainkan lebih banyak diarahkan pada proses yang digunakan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan (Barizi & Triarda, 2023).

Meningkatnya perhatian terhadap aspek prosedural dalam pembentukan kebijakan menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak lagi dinilai semata-mata berdasarkan hasil yang dicapai, tetapi juga berdasarkan cara hasil tersebut diperoleh. Masyarakat semakin menuntut adanya keterbukaan informasi, akses terhadap proses pengambilan keputusan, serta kesempatan untuk menyampaikan pandangan sebelum suatu kebijakan ditetapkan. Dalam situasi seperti ini, legitimasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga oleh kemampuannya memperoleh penerimaan dari masyarakat yang menjadi subjek dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kebijakan berbasis kepentingan ekonomi strategis tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mengenai bagaimana negara memastikan bahwa proses pembentukannya tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional (Sutmasa, 2021).

Persoalan tersebut menjadi semakin penting mengingat konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen yang membatasi penggunaan kekuasaan negara. Ketika kebijakan ekonomi strategis memperoleh posisi yang semakin dominan dalam agenda pembangunan nasional, muncul kebutuhan untuk menilai apakah orientasi tersebut tetap sejalan dengan tujuan konstitusional yang lebih luas. Pertanyaan ini menjadi relevan karena pembangunan yang berhasil secara ekonomi belum tentu mencerminkan keberhasilan dalam menjaga kualitas demokrasi. Sebaliknya, demokrasi yang memberikan ruang luas bagi partisipasi masyarakat juga menghadapi tantangan untuk tetap mampu menghasilkan kebijakan yang efektif dalam menjawab kebutuhan pembangunan (Heriyono, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas pembentukan kebijakan yang didasarkan pada kepentingan ekonomi strategis di tengah semakin besarnya tuntutan terhadap percepatan pembangunan nasional. Fokus kajian diarahkan pada penilaian mengenai sejauh mana orientasi pembangunan yang menjadi dasar pembentukan kebijakan tetap berjalan selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menelaah hubungan antara kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan kualitas demokrasi dalam proses pembentukan kebijakan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai upaya menjaga keseimbangan antara efektivitas pencapaian tujuan pembangunan dan penghormatan terhadap mekanisme demokratis dalam kerangka negara hukum.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Perumusan Kebijakan Publik

Perumusan kebijakan adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Perlu diingat pula bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah perumusan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi, sebab sering kali para pengambil kebijakan beranggapan bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah sebuah konseptual yang sarat dengan pesan-pesan ideal dan normatif, namun tidak membumi (Septiana et al., 2023).

Dalam tataran konseptual perumusan kebijakan tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pemimpin yang mewakili anggota, tetapi juga berisi opini publik (publik opinion) dan suara publik (publik voice). Hal ini disebabkan oleh proses pembuatan kebijakan pada esensinya tidak pernah bebas nilai (value free) sehingga berbagai kepentingan akan selalu mempengaruhi proses pembuatan kebijakan (Harsoyo, 2020).

Bintoro Tjokroamidjojo, Bapak Administrasi Pembangunan Indonesia, mengemukakan bahwa “Policy Fomulation sama dengan Policy Making, dan ini berbeda dengan decision making (pengambilan keputusan)”. Policy making memiliki konteks pengertian yang lebih luas dari decision making. Sedangkan William R. Dhall mendefinisikan decision making sebagai pemilihan atas pelbagai macam alternatif. Sementara Nigro dan Nigro mengemukakan bahwa tidak ada perbedaan mutlak yang dapat dibuat antara pengambilan keputusan decision making dengan pembuatan kebijakan (policy making), karena itu, setiap pembuatan kebijakan adalah suatu pembuatan keputusan. Akan tetapi, pengambilan kebijakan membentuk rangkaian-rangkaian tindakan yang mengarah ke banyak macam keputusan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah dipilih (Turot, 2021).

Selanjutnya, Tjokroamidjojo menegaskan bahwa “apabila pemilihan alternatif itu sekali dilakukan dan selesai, maka kegiatan tersebut disebut pengambilan keputusan; sebaliknya bila pemilihan alternatif itu terus-menerus dilakukan dan tidak pernah selesai, maka kegiatan tersebut dinamakan perumusan kebijakan (Maidiana & Harahap, 2021).

Beberapa pakar menjelaskan bahwa proses perumusan kebijakan publik selalu dan harus memperhatikan beberapa karakteristik penting agar dapat mencapai sasaran kebijakan yang dituangkan dalam tahapan implementasi kebijakan. Misalnya, dijelaskan oleh O’Jones bahwa ada empat varian kelompok kepentingan bila dilihat atas interest dan akses serta kebutuhan masyarakat pada perumusan kebijakan publik, yaitu:

- a. Kelompok kepentingan yang terorganisasi dengan baik dengan akses yang mapan,
- b. Kelompok kepentingan yang terorganisasi dengan baik tanpa akses yang mapan,
- c. Kelompok kepentingan yang tidak terorganisasi dengan baik tetapi memiliki akses yang mapan,
- d. Kelompok kepentingan yang tidak terorganisasi sekaligus juga tidak memiliki akses yang mapan (Anggraini et al., 2020).

2. Ekonomi Strategis

Istilah ekonomi strategis pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan aktivitas, sektor, sumber daya, atau kebijakan ekonomi yang memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan, menjaga stabilitas ekonomi, serta memperkuat posisi nasional dalam jangka panjang. Berbagai kajian ekonomi pembangunan menunjukkan bahwa unsur yang dikategorikan sebagai strategis umumnya memiliki keterkaitan yang luas dengan sektor-sektor lain dalam perekonomian sehingga mampu menghasilkan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, suatu sektor atau kebijakan dianggap memiliki nilai strategis ketika keberadaannya memberikan kontribusi penting terhadap arah dan keberlanjutan pembangunan ekonomi suatu negara (Setyaningrum et al., 2021).

Dalam literatur pembangunan wilayah dan ekonomi regional, ekonomi strategis sering dikaitkan dengan keberadaan sektor-sektor kunci yang memiliki kemampuan mendorong aktivitas ekonomi baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Penelitian mengenai sektor strategis di berbagai wilayah Indonesia menjelaskan bahwa sektor strategis merupakan sektor yang mampu menciptakan keterkaitan ekonomi yang luas, menghasilkan efek pengganda (multiplier effect), memperkuat hubungan antar sektor ekonomi, serta berkontribusi terhadap peningkatan output dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, sektor-sektor yang memiliki karakteristik tersebut sering menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan dan pembentukan kebijakan negara karena dianggap mampu memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan sektor lainnya (Sihite, 2022).

Pada tingkat kebijakan nasional, ekonomi strategis juga dipahami sebagai berbagai sumber daya dan aktivitas ekonomi yang memiliki arti penting bagi kepentingan negara serta

kesejahteraan masyarakat. Kajian mengenai tata kelola sumber daya strategis menunjukkan bahwa sumber daya alam, energi, infrastruktur, industri dasar, teknologi, dan berbagai aset ekonomi yang memengaruhi struktur perekonomian nasional sering ditempatkan dalam kategori ekonomi strategis karena berperan dalam menentukan kapasitas pembangunan dan daya saing negara. Dalam perspektif ini, perhatian negara terhadap sektor-sektor strategis tidak hanya didasarkan pada nilai ekonominya semata, tetapi juga pada kemampuannya dalam mendukung ketahanan ekonomi, kemandirian nasional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Anwar, 2022).

Ekonomi strategis dapat dipahami sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang memiliki pengaruh penting terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga memperoleh prioritas yang lebih besar dalam proses perencanaan maupun pembentukan kebijakan negara. Sektor atau program yang dikategorikan sebagai strategis umumnya menjadi sasaran utama intervensi kebijakan karena dianggap mampu memberikan kontribusi yang luas terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, penguatan daya saing, dan perluasan kesempatan kerja. Dalam konteks Indonesia, orientasi terhadap ekonomi strategis sering tercermin melalui prioritas pada pembangunan infrastruktur, investasi, hilirisasi industri, energi, konektivitas wilayah, serta berbagai program pembangunan nasional yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi negara dalam jangka panjang (Jaya et al., 2021).

C. METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji berbagai persoalan yang berkaitan dengan konstitusionalitas pembentukan kebijakan berbasis kepentingan ekonomi strategis serta implikasinya terhadap keseimbangan antara pembangunan dan demokrasi. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai sumber yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, laporan akademik, dan berbagai literatur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Penggunaan beragam sumber tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan ekonomi strategis, sekaligus memahami berbagai pandangan yang berkembang mengenai hubungan antara agenda pembangunan dan praktik demokrasi dalam penyelenggaraan negara. Setelah data penelitian berhasil dikumpulkan, data-data tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif melalui proses penelaahan, pengelompokan, serta interpretasi terhadap berbagai informasi yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan menghubungkan berbagai temuan dari literatur yang digunakan untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta isu-isu yang berkaitan dengan pembentukan kebijakan berbasis kepentingan ekonomi strategis. Melalui proses tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan yang dibentuk atas dasar pertimbangan pembangunan ekonomi ditempatkan dalam konteks demokrasi, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai secara sistematis dan terarah (Roosinda et al., 2021).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penguatan Orientasi Kepentingan Ekonomi dalam Pembentukan Kebijakan Negara

Dalam beberapa tahun terakhir, arah pembentukan kebijakan negara di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin kuat untuk menempatkan pembangunan ekonomi sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menentukan prioritas pemerintahan. Kecenderungan tersebut dapat diamati dari berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang menempatkan transformasi ekonomi, peningkatan produktivitas nasional, penguatan daya saing, serta percepatan investasi sebagai sasaran yang terus memperoleh perhatian. Kondisi ini tidak terlepas dari kebutuhan negara untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menciptakan

fondasi yang mampu mendukung pertumbuhan jangka panjang. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung setelah pandemi COVID-19, pemerintah berupaya mengarahkan berbagai instrumen kebijakan agar mampu mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus meningkatkan kapasitas ekonomi nasional. Akibatnya, berbagai kebijakan yang dihasilkan selama periode tersebut cenderung disusun dengan mempertimbangkan kontribusinya terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor produksi, dan peningkatan daya tarik investasi.

Peningkatan prioritas pembangunan ekonomi dalam agenda kebijakan nasional juga terlihat dari semakin eratnya hubungan antara proses perencanaan pembangunan dan pembentukan regulasi. Kebijakan tidak lagi diposisikan semata sebagai instrumen administratif yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, melainkan juga sebagai sarana untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam konteks tersebut, pembangunan ekonomi menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap arah pembentukan kebijakan. Berbagai regulasi yang disusun diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang dianggap memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Situasi ini menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi tidak hanya hadir pada tahap implementasi kebijakan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses penentuan prioritas kebijakan sejak tahap perencanaan.

Kecenderungan tersebut semakin menguat ketika target pertumbuhan ekonomi mulai ditempatkan sebagai salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan setiap tahun mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh sektor pembangunan bergerak secara terkoordinasi dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut. Dalam praktiknya, target pertumbuhan ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai ukuran kinerja ekonomi nasional, tetapi juga memengaruhi arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Berbagai kebijakan yang dianggap mampu meningkatkan produktivitas, memperluas investasi, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan memperkuat sektor industri memperoleh perhatian yang lebih besar dibandingkan kebijakan yang tidak memiliki dampak langsung terhadap pencapaian target ekonomi. Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung menjadi salah satu faktor yang memengaruhi proses penentuan prioritas dalam pembentukan kebijakan negara.

Pengaruh target pertumbuhan ekonomi terhadap pembentukan kebijakan juga terlihat dari semakin kuatnya orientasi pada penciptaan iklim usaha yang kondusif. Dalam berbagai sektor, pemerintah berupaya mengurangi hambatan-hambatan yang dinilai dapat memperlambat aktivitas ekonomi. Langkah tersebut dilakukan melalui penyederhanaan prosedur, percepatan perizinan, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta berbagai upaya lain yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan publik (Nujum & Rahman, 2019). Kebijakan semacam ini menunjukkan bahwa pencapaian target ekonomi tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab sektor ekonomi semata, melainkan menjadi tujuan yang memengaruhi keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan. Akibatnya, pembentukan kebijakan semakin diarahkan pada upaya menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Dalam konteks yang lebih luas, investasi kemudian memperoleh posisi yang sangat penting dalam proses pembentukan kebijakan negara. Investasi dipandang sebagai salah satu instrumen utama yang mampu mendorong ekspansi kegiatan ekonomi, meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat penerimaan negara. Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang berkaitan dengan investasi sering kali ditempatkan sebagai bagian dari agenda prioritas nasional. Pemerintah berupaya memastikan bahwa berbagai hambatan yang berpotensi mengurangi minat investasi dapat diminimalkan melalui pembentukan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan ekonomi. Kehadiran investasi tidak hanya dipandang sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai sarana untuk

mempercepat transformasi ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas dan penguatan sektor-sektor strategis.

Selain investasi, pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pembentukan kebijakan negara. Infrastruktur diposisikan sebagai fondasi yang memungkinkan berbagai aktivitas ekonomi berjalan secara lebih efisien. Jalan tol, pelabuhan, bandara, kawasan industri, bendungan, jaringan energi, serta berbagai infrastruktur lainnya dipandang memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur memperoleh perhatian yang sangat besar dalam agenda pembangunan nasional. Berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengadaan lahan, pembiayaan pembangunan, percepatan proyek, hingga koordinasi antarinstansi disusun untuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

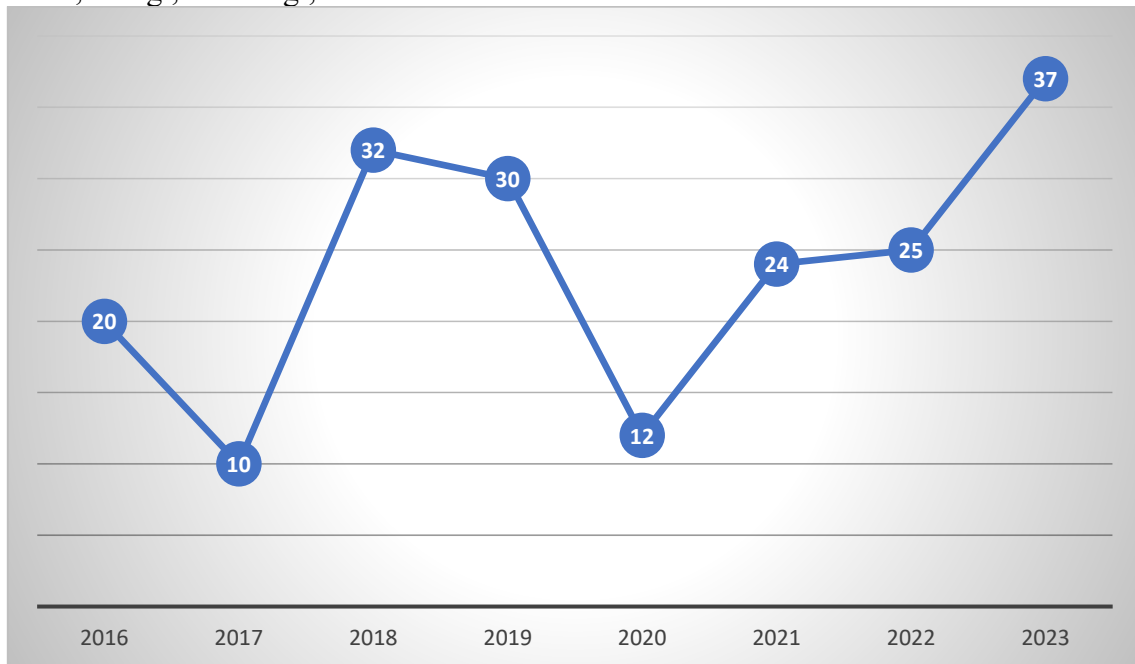
Besarnya perhatian terhadap investasi dan pembangunan infrastruktur kemudian berpengaruh terhadap prioritas regulasi yang dibentuk oleh negara. Regulasi semakin diarahkan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan yang dianggap memiliki dampak strategis terhadap perekonomian nasional. Dalam situasi tersebut, kebijakan negara menunjukkan kecenderungan untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sektor-sektor yang dinilai mampu menghasilkan efek pengganda bagi pertumbuhan ekonomi. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi telah menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan sektor mana yang memperoleh prioritas dalam proses pembentukan kebijakan.

Sejalan dengan semakin besarnya orientasi pembangunan ekonomi, proses pengambilan kebijakan juga menunjukkan kecenderungan untuk dilaksanakan secara lebih cepat dibandingkan periode-periode sebelumnya. Kebutuhan untuk segera merealisasikan berbagai program pembangunan mendorong pemerintah untuk mempercepat proses perumusan dan implementasi kebijakan. Percepatan tersebut sering kali dipandang sebagai langkah yang diperlukan untuk menghindari keterlambatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih besar. Dalam banyak keadaan, kecepatan pengambilan keputusan dianggap sebagai faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program strategis yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Kecenderungan percepatan proses pengambilan kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari semakin kompleksnya tantangan pembangunan yang dihadapi negara. Persaingan ekonomi global, perubahan struktur industri, perkembangan teknologi, serta kebutuhan untuk meningkatkan daya saing nasional menuntut pemerintah untuk mampu bertindak secara cepat dan efektif. Akibatnya, berbagai mekanisme yang dianggap dapat memperlambat proses pengambilan keputusan berupaya disederhanakan agar kebijakan dapat segera diimplementasikan. Dalam perspektif pembangunan, pendekatan tersebut dipandang sebagai langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa negara mampu merespons berbagai peluang dan tantangan ekonomi secara tepat waktu.

Hubungan antara kepentingan ekonomi strategis dan penentuan program prioritas negara terlihat semakin jelas hingga tahun 2023. Berbagai program yang memperoleh status prioritas nasional pada periode tersebut sebagian besar memiliki keterkaitan langsung dengan agenda pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur, penguatan konektivitas wilayah, pengembangan kawasan industri, peningkatan kapasitas energi, serta penguatan sistem logistik nasional. Salah satu indikator yang menunjukkan kuatnya orientasi tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan bahwa hingga Desember 2023 telah diselesaikan sebanyak 190 Proyek Strategis Nasional dengan nilai investasi mencapai Rp1.515,4 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 37 proyek berhasil diselesaikan sepanjang

tahun 2023, mencakup berbagai sektor seperti bendungan, pelabuhan, jalan tol, perkeretaapian, bandara, energi, teknologi, dan kawasan ekonomi.



Gambar 1. Tren Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2016–2023

Gambar 1 menunjukkan bahwa penyelesaian Proyek Strategis Nasional mengalami perkembangan yang fluktuatif sepanjang periode 2016–2023, namun secara umum memperlihatkan kecenderungan peningkatan pada tahun-tahun akhir pengamatan. Jumlah proyek yang berhasil diselesaikan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan 37 proyek, lebih tinggi dibandingkan capaian pada sebagian besar tahun sebelumnya. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa program-program yang dikategorikan sebagai proyek strategis memperoleh perhatian yang semakin besar dalam agenda pembangunan nasional. Peningkatan jumlah proyek yang diselesaikan juga menunjukkan adanya konsistensi pemerintah dalam menempatkan pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor ekonomi strategis sebagai bagian penting dari prioritas kebijakan nasional hingga akhir tahun 2023.

Data tersebut menunjukkan bahwa program-program yang memperoleh prioritas tinggi dalam kebijakan negara hingga tahun 2023 memiliki hubungan yang sangat erat dengan tujuan memperkuat kapasitas ekonomi nasional. Tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, berbagai proyek tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, memperluas akses terhadap pusat-pusat ekonomi, memperkuat integrasi antarwilayah, serta menciptakan peluang ekonomi baru di berbagai daerah. Bahkan, pemerintah mencatat bahwa penyelesaian proyek-proyek strategis tersebut telah menyerap jutaan tenaga kerja dan menjadi bagian penting dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga akhir tahun 2023, total 190 PSN yang telah diselesaikan diperkirakan menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja langsung.

2. Konstitusionalitas Proses Pembentukan Kebijakan Berbasis Kepentingan Ekonomi Strategis

Meningkatnya penggunaan pertimbangan ekonomi strategis dalam pembentukan kebijakan negara telah menempatkan proses pembentukan kebijakan sebagai salah satu aspek yang memperoleh perhatian penting dalam kajian ketatanegaraan. Perhatian tersebut tidak semata-mata diarahkan pada tujuan pembangunan yang hendak dicapai melalui suatu kebijakan, melainkan juga pada bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan, dibahas, ditetapkan, dan dijalankan dalam kerangka penyelenggaraan negara yang berlandaskan

konstitusi. Dalam negara yang menempatkan konstitusi sebagai sumber legitimasi tertinggi bagi tindakan pemerintahan, setiap kebijakan yang dihasilkan harus lahir melalui proses yang sejalan dengan ketentuan konstitusional yang berlaku. Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis dapat dijadikan ukuran tunggal untuk menilai kualitas kebijakan tersebut. Proses pembentukan kebijakan tetap harus memperhatikan berbagai prinsip yang berkaitan dengan penggunaan kewenangan negara, perlindungan hak-hak warga negara, serta mekanisme pengawasan yang menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, negara sering dihadapkan pada kebutuhan untuk mengambil keputusan secara cepat guna merespons berbagai tantangan yang muncul. Persaingan global, perubahan kondisi pasar internasional, kebutuhan peningkatan investasi, serta tuntutan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur merupakan beberapa faktor yang mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan strategis dalam waktu yang relatif singkat. Namun demikian, kebutuhan akan kecepatan tersebut tidak menghilangkan kewajiban negara untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pembentukan kebijakan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pembentukan kebijakan tidak hanya berkaitan dengan pencapaian hasil akhir yang diinginkan, tetapi juga berkaitan dengan cara negara menggunakan kewenangannya dalam menentukan arah pembangunan. Oleh karena itu, kesesuaian proses pembentukan kebijakan dengan ketentuan konstitusional menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama ketika kebijakan tersebut memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat.

Kesesuaian dengan ketentuan konstitusional pada dasarnya menuntut agar pembentukan kebijakan dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam sistem ketatanegaraan. Setiap lembaga negara harus menjalankan kewenangannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan, sehingga tidak terjadi penggunaan kekuasaan yang melampaui kewenangan yang diberikan. Dalam praktiknya, kebijakan yang berorientasi pada kepentingan ekonomi strategis sering kali melibatkan berbagai institusi negara dengan tingkat kewenangan yang berbeda-beda. Situasi tersebut memerlukan koordinasi yang baik agar proses pembentukan kebijakan tetap berlangsung dalam koridor hukum yang jelas. Ketika prosedur yang telah ditentukan tidak dijalankan secara memadai, muncul risiko berkurangnya legitimasi kebijakan, sekalipun kebijakan tersebut memiliki tujuan yang dianggap penting bagi pembangunan nasional.

Selain persoalan prosedural, pembentukan kebijakan yang berorientasi pada pembangunan ekonomi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan partisipasi publik. Dalam negara yang memberikan ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, partisipasi publik tidak hanya dipandang sebagai pelengkap administratif, tetapi menjadi bagian penting dari proses pembentukan kebijakan itu sendiri. Kehadiran masyarakat dalam berbagai tahapan perumusan kebijakan memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antara pemerintah dan kelompok-kelompok yang akan terdampak oleh kebijakan tersebut. Melalui partisipasi publik, berbagai kepentingan yang berkembang di masyarakat dapat diidentifikasi sejak awal sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi.

Pentingnya partisipasi publik menjadi semakin nyata ketika kebijakan yang dibentuk berkaitan dengan kepentingan ekonomi strategis yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Pembangunan kawasan industri, pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, maupun program-program prioritas lainnya sering kali memengaruhi berbagai kelompok masyarakat dengan tingkat kepentingan yang berbeda (Sarfiyah et al., 2023). Dalam situasi seperti ini, keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan menjadi faktor yang penting untuk memastikan bahwa berbagai perspektif dapat dipertimbangkan secara proporsional. Partisipasi publik juga berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi kemungkinan

terjadinya kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat.

Di sisi lain, orientasi yang kuat terhadap pencapaian target ekonomi terkadang menimbulkan kecenderungan untuk memandang partisipasi publik sebagai faktor yang berpotensi memperlambat proses pengambilan keputusan. Ketika pemerintah dihadapkan pada tuntutan untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan, ruang konsultasi publik dalam beberapa keadaan dapat menjadi lebih terbatas dibandingkan dengan yang diharapkan. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana proses pembentukan kebijakan tetap mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat ketika negara berada dalam posisi untuk mengejar target-target pembangunan yang dianggap mendesak. Persoalan ini menjadi penting karena kualitas partisipasi publik tidak hanya diukur dari keberadaan mekanisme formal, tetapi juga dari sejauh mana masukan yang disampaikan masyarakat benar-benar dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

Sejalan dengan pentingnya partisipasi publik, transparansi juga menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar terhadap konstusionalitas pembentukan kebijakan. Transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi yang berkaitan dengan proses perumusan dan penetapan kebijakan. Ketersediaan informasi yang memadai memberikan kesempatan bagi publik untuk memahami alasan yang mendasari suatu kebijakan, tujuan yang ingin dicapai, serta implikasi yang mungkin ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Dalam konteks kebijakan ekonomi strategis, transparansi menjadi semakin penting karena kebijakan yang dibentuk sering kali melibatkan penggunaan sumber daya negara dalam jumlah besar dan memiliki dampak jangka panjang terhadap pembangunan nasional.

Keterbukaan informasi juga berfungsi sebagai instrumen yang memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Semakin besar dampak suatu kebijakan terhadap kehidupan masyarakat, semakin besar pula kebutuhan akan keterbukaan dalam proses pembentukannya. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan publikasi dokumen atau penyampaian informasi secara formal, tetapi juga menyangkut kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang relevan dan memahami proses yang sedang berlangsung. Ketika informasi mengenai proses pembentukan kebijakan sulit diakses atau hanya tersedia secara terbatas, muncul risiko berkurangnya kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dihasilkan.

Berhubungan erat dengan transparansi adalah aspek akuntabilitas. Dalam pembentukan kebijakan yang berorientasi pada pembangunan ekonomi, akuntabilitas menjadi mekanisme yang memastikan bahwa penggunaan kewenangan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas menuntut agar setiap keputusan yang diambil memiliki dasar pertimbangan yang jelas dan dapat dijelaskan secara terbuka. Dalam konteks ini, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur berdasarkan capaian ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga berdasarkan kemampuan pemerintah untuk menjelaskan alasan di balik keputusan yang diambil serta kesediaan untuk menerima evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

Pentingnya akuntabilitas semakin meningkat ketika kebijakan yang dibentuk melibatkan berbagai kepentingan ekonomi yang besar. Kehadiran berbagai aktor yang memiliki kepentingan terhadap suatu kebijakan dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya pengaruh yang tidak proporsional dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, mekanisme akuntabilitas diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar ditujukan bagi kepentingan publik dan bukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu. Dalam hal ini, akuntabilitas berfungsi sebagai instrumen yang menjaga integritas proses pembentukan kebijakan sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan yang dihasilkan.

Peran lembaga negara menjadi faktor lain yang sangat menentukan dalam menjaga konstusionalitas proses pembentukan kebijakan. Sistem ketatanegaraan pada dasarnya

dirancang untuk memastikan bahwa penggunaan kekuasaan tidak terpusat pada satu institusi saja. Berbagai lembaga negara memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam proses pembentukan dan pengawasan kebijakan. Kehadiran lembaga legislatif, lembaga yudisial, serta berbagai institusi pengawasan lainnya memungkinkan terjadinya kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh pemerintah. Mekanisme tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibentuk tetap berada dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh konstitusi.

Dalam praktiknya, pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggaran prosedural, tetapi juga untuk menilai apakah proses pembentukan kebijakan telah memperhatikan berbagai kepentingan yang relevan secara proporsional. Pengawasan tersebut menjadi semakin penting ketika kebijakan yang dibentuk memiliki nilai strategis yang tinggi dan melibatkan sumber daya negara dalam jumlah besar. Melalui fungsi pengawasan, lembaga negara dapat berperan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan terhadap prinsip-prinsip yang menjadi dasar penyelenggaraan negara.

Meskipun berbagai mekanisme telah tersedia untuk menjaga konstitusionalitas pembentukan kebijakan, potensi munculnya persoalan konstitusional tetap tidak dapat diabaikan. Potensi tersebut umumnya muncul ketika pertimbangan ekonomi memperoleh posisi yang terlalu dominan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam situasi seperti ini, keberhasilan pembangunan ekonomi berisiko menjadi satu-satunya ukuran yang digunakan untuk menilai suatu kebijakan, sementara aspek-aspek lain yang juga memiliki kepentingan konstitusional memperoleh perhatian yang lebih kecil. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam proses pembentukan kebijakan dan memunculkan pertanyaan mengenai legitimasi keputusan yang dihasilkan.

Dominasi pertimbangan ekonomi juga dapat menyebabkan berkurangnya ruang bagi berbagai pertimbangan non-ekonomi yang sebenarnya memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan negara. Ketika pencapaian target pembangunan ditempatkan sebagai tujuan yang harus dicapai dalam waktu singkat, terdapat kemungkinan bahwa proses konsultasi, pengawasan, maupun evaluasi terhadap kebijakan menjadi kurang optimal. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan berpotensi menghadapi persoalan konstitusional karena proses pembentukannya dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar penggunaan kekuasaan negara.

3. Implikasi Kebijakan Ekonomi Strategis terhadap Kualitas Demokrasi

Penguatan orientasi pembangunan ekonomi dalam pembentukan kebijakan negara tidak hanya membawa konsekuensi terhadap arah pembangunan nasional, tetapi juga memengaruhi kualitas demokrasi yang berkembang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Ketika kebijakan ekonomi strategis ditempatkan sebagai instrumen utama untuk mencapai berbagai target pembangunan, proses pengambilan keputusan cenderung mengalami perubahan dalam hal prioritas, pola interaksi antara negara dan masyarakat, serta mekanisme yang digunakan untuk menghasilkan kebijakan. Dalam situasi demikian, demokrasi tidak lagi hanya dihadapkan pada persoalan bagaimana kekuasaan diperoleh dan dijalankan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat dibentuk dan dilegitimasi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai implikasi kebijakan ekonomi strategis terhadap kualitas demokrasi menjadi penting karena pembangunan ekonomi dan demokrasi pada dasarnya berlangsung dalam ruang kebijakan yang sama dan saling memengaruhi satu sama lain.

Dalam banyak keadaan, kebijakan ekonomi strategis lahir dari kebutuhan negara untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dianggap mendesak. Peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, penguatan industri nasional, hilirisasi sumber daya alam, serta pengembangan kawasan ekonomi tertentu sering kali ditempatkan sebagai agenda prioritas

yang memerlukan dukungan kebijakan secara cepat dan terkoordinasi. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memusatkan perhatian pada upaya memastikan bahwa berbagai program pembangunan dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan. Namun demikian, semakin besarnya perhatian terhadap efektivitas pembangunan juga membawa konsekuensi terhadap ruang keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan. Ketika keberhasilan pembangunan diukur berdasarkan kecepatan pelaksanaan dan capaian ekonomi yang dapat dihitung secara konkret, muncul kecenderungan untuk menempatkan partisipasi publik sebagai faktor yang harus disesuaikan dengan kebutuhan percepatan pembangunan.

Ruang keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi. Melalui keterlibatan tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan, mengemukakan keberatan, memberikan masukan, serta memengaruhi arah kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah. Kehadiran masyarakat dalam proses kebijakan juga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang lebih luas sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan pemerintah semata (Sepyah et al., 2022). Akan tetapi, ketika kebijakan yang dibahas dikategorikan sebagai kebijakan strategis yang dianggap memiliki urgensi tinggi bagi pembangunan ekonomi, ruang partisipasi tersebut dalam beberapa keadaan dapat mengalami penyempitan. Fokus yang besar terhadap pencapaian target pembangunan sering kali menyebabkan proses konsultasi publik berlangsung dalam waktu yang lebih terbatas dibandingkan dengan kebijakan yang tidak memiliki status strategis.

Penyempitan ruang partisipasi tidak selalu muncul dalam bentuk penghapusan mekanisme keterlibatan masyarakat. Dalam banyak kasus, partisipasi publik tetap tersedia secara formal, namun kualitas keterlibatan yang terjadi menjadi lebih terbatas. Masyarakat mungkin tetap diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, tetapi pengaruh masukan tersebut terhadap substansi kebijakan menjadi relatif kecil dibandingkan dengan kepentingan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Akibatnya, partisipasi publik berpotensi berubah menjadi proses yang lebih bersifat administratif daripada substantif. Situasi ini penting untuk diperhatikan karena demokrasi tidak hanya memerlukan keberadaan prosedur partisipasi, tetapi juga memerlukan jaminan bahwa partisipasi tersebut memiliki arti dalam proses pengambilan keputusan.

Persoalan tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan hubungan antara percepatan pembangunan dan kualitas deliberasi publik. Dalam sistem pemerintahan modern, deliberasi publik memiliki fungsi penting sebagai sarana untuk mempertemukan berbagai kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Melalui proses deliberasi, kebijakan dapat dibahas secara lebih terbuka sehingga berbagai dampak yang mungkin timbul dapat diidentifikasi sebelum kebijakan diterapkan. Deliberasi juga memungkinkan pemerintah memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai kondisi yang dihadapi masyarakat. Namun, kebutuhan untuk mempercepat pembangunan sering kali menciptakan tekanan terhadap proses deliberasi tersebut. Ketika suatu kebijakan dianggap harus segera dilaksanakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi atau menarik investasi, ruang waktu yang tersedia untuk diskusi publik menjadi lebih terbatas.

Keterbatasan ruang deliberasi dapat memengaruhi kualitas kebijakan yang dihasilkan. Kebijakan yang dibentuk melalui proses diskusi yang singkat berisiko tidak sepenuhnya menangkap berbagai persoalan yang berkembang di lapangan. Dalam jangka pendek, pendekatan semacam ini mungkin menghasilkan percepatan pelaksanaan program pembangunan. Akan tetapi, dalam jangka panjang, kebijakan yang kurang memperoleh masukan dari berbagai kelompok masyarakat berpotensi menghadapi resistensi pada tahap implementasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa percepatan pembangunan dan kualitas deliberasi publik bukanlah dua aspek yang dapat dipisahkan secara mutlak. Semakin terbatas

ruang deliberasi yang tersedia, semakin besar pula tantangan yang dihadapi dalam memastikan bahwa kebijakan memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat.

Selain memengaruhi partisipasi dan deliberasi publik, prioritas pembangunan ekonomi juga memiliki dampak terhadap mekanisme pengawasan publik. Dalam sistem demokrasi, pengawasan publik merupakan salah satu instrumen yang memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan kewenangan oleh pemerintah. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media massa, organisasi masyarakat sipil, lembaga akademik, maupun partisipasi langsung warga negara. Kehadiran mekanisme pengawasan menjadi penting karena kebijakan publik pada dasarnya melibatkan penggunaan sumber daya negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Ketika pembangunan ekonomi ditempatkan sebagai prioritas utama, muncul kemungkinan bahwa perhatian publik lebih banyak diarahkan pada hasil pembangunan dibandingkan dengan proses yang digunakan untuk mencapainya. Dalam situasi seperti ini, keberhasilan pembangunan sering kali digunakan sebagai dasar untuk membenarkan berbagai keputusan yang diambil oleh pemerintah. Akibatnya, ruang kritik terhadap proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan dapat menjadi lebih sempit karena perhatian publik terfokus pada capaian ekonomi yang berhasil ditunjukkan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas mekanisme pengawasan yang seharusnya berfungsi untuk memastikan bahwa penggunaan kewenangan negara tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

Dampak terhadap pengawasan publik juga terlihat dari meningkatnya kompleksitas kebijakan ekonomi strategis yang dibentuk oleh pemerintah. Banyak kebijakan strategis melibatkan aspek teknis yang rumit dan membutuhkan pemahaman khusus untuk dapat dievaluasi secara mendalam. Kompleksitas tersebut sering kali menciptakan kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Ketika masyarakat menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi yang memadai, kemampuan untuk melakukan pengawasan secara efektif menjadi berkurang. Dalam kondisi seperti ini, pengawasan publik dapat kehilangan sebagian fungsinya sebagai instrumen yang menjaga akuntabilitas pemerintahan.

Implikasi lain yang tidak kalah penting berkaitan dengan posisi kelompok masyarakat yang terdampak oleh kebijakan ekonomi strategis. Kebijakan pembangunan pada umumnya tidak menghasilkan dampak yang sama bagi seluruh kelompok masyarakat. Sebagian kelompok dapat memperoleh manfaat yang signifikan dari pembangunan yang dilakukan, sementara kelompok lainnya mungkin menghadapi konsekuensi yang lebih besar akibat perubahan yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang efektif, tetapi juga oleh kemampuan sistem pemerintahan untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok yang terdampak memiliki kesempatan yang memadai untuk menyampaikan kepentingannya.

Tabel 1. Implikasi Kebijakan Ekonomi Strategis terhadap Kualitas Demokrasi

Dimensi Demokrasi	Pengaruh Kebijakan Ekonomi Strategis	Implikasi terhadap Kualitas Demokrasi
Keterlibatan Masyarakat	Percepatan pelaksanaan program strategis dapat membatasi ruang konsultasi dan partisipasi publik dalam proses kebijakan.	Berpotensi mengurangi tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik.
Deliberasi Publik	Fokus pada efektivitas dan kecepatan pembangunan sering kali memperpendek ruang diskusi serta	Kualitas pembahasan publik dapat menjadi kurang mendalam dan kurang inklusif.

ARTIKEL

	pertukaran pandangan antar pemangku kepentingan.	
Pengawasan Publik	Kompleksitas proyek dan orientasi pada pencapaian target pembangunan dapat menyulitkan masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap proses kebijakan.	Efektivitas mekanisme pengawasan publik berpotensi menurun.
Posisi Kelompok Terdampak	Kelompok yang terdampak langsung oleh kebijakan tidak selalu memiliki akses yang setara dalam proses pengambilan keputusan.	Risiko terjadinya ketimpangan representasi kepentingan dalam kebijakan publik.
Transparansi Kebijakan	Kebutuhan percepatan pembangunan dapat memengaruhi tingkat keterbukaan informasi dalam beberapa tahapan kebijakan.	Kemampuan masyarakat untuk memahami dan mengevaluasi kebijakan menjadi terbatas.
Akuntabilitas Pemerintah	Penekanan pada hasil pembangunan dapat menggeser perhatian dari evaluasi terhadap proses pembentukan kebijakan.	Potensi berkurangnya kontrol terhadap penggunaan kewenangan negara.
Legitimasi Demokratis	Kebijakan yang efektif secara ekonomi belum tentu memperoleh penerimaan yang tinggi apabila partisipasi dan pengawasan publik terbatas.	Legitimasi kebijakan bergantung pada keseimbangan antara hasil dan proses demokratis.
Keseimbangan Pembangunan dan Demokrasi	Pembangunan ekonomi memerlukan efektivitas kebijakan, sedangkan demokrasi menuntut keterbukaan dan partisipasi.	Diperlukan keseimbangan agar pembangunan tidak mengurangi kualitas demokrasi.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, implikasi kebijakan ekonomi strategis terhadap kualitas demokrasi tidak hanya berkaitan dengan hasil pembangunan yang dicapai, tetapi juga menyentuh berbagai aspek yang membentuk legitimasi penyelenggaraan pemerintahan. Pengaruh tersebut terlihat pada ruang partisipasi masyarakat, kualitas deliberasi publik, efektivitas pengawasan, posisi kelompok terdampak, hingga hubungan antara efektivitas kebijakan dan legitimasi demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar peran pertimbangan ekonomi dalam proses pembentukan kebijakan, semakin penting pula upaya untuk memastikan bahwa mekanisme demokratis tetap berjalan secara optimal. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dan demokrasi perlu ditempatkan sebagai tujuan yang saling melengkapi agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif dalam mencapai target pembangunan, tetapi juga memiliki dasar legitimasi yang kuat di hadapan masyarakat.

Dalam praktiknya, kelompok masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan strategis sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan aktor-aktor yang memiliki akses lebih besar terhadap proses pengambilan keputusan. Ketimpangan akses tersebut dapat menyebabkan aspirasi kelompok terdampak memperoleh perhatian yang lebih kecil dibandingkan dengan kepentingan yang dianggap lebih relevan terhadap pencapaian target pembangunan. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan berpotensi mencerminkan preferensi kelompok tertentu secara lebih dominan daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Situasi ini menjadi penting karena salah satu ukuran kualitas demokrasi terletak pada kemampuan sistem politik untuk mengakomodasi berbagai kepentingan secara seimbang.

Persoalan mengenai posisi kelompok terdampak juga berkaitan erat dengan persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam proses pengambilan kebijakan. Masyarakat tidak hanya

menilai kebijakan berdasarkan hasil yang diperoleh, tetapi juga berdasarkan apakah proses yang digunakan dianggap memberikan kesempatan yang setara bagi semua pihak untuk terlibat. Ketika kelompok tertentu merasa bahwa kepentingannya tidak memperoleh perhatian yang memadai, tingkat kepercayaan terhadap kebijakan yang dihasilkan cenderung menurun. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi hubungan antara masyarakat dan pemerintah serta mengurangi tingkat legitimasi yang dimiliki oleh kebijakan publik.

Pada akhirnya, seluruh persoalan tersebut bermuara pada kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas kebijakan dan legitimasi demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Efektivitas kebijakan merupakan aspek yang penting karena negara dituntut untuk mampu menghasilkan berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tanpa efektivitas, berbagai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sulit untuk diwujudkan secara optimal. Namun demikian, efektivitas semata tidak cukup untuk menjamin kualitas pemerintahan yang baik. Kebijakan yang efektif tetapi dibentuk melalui proses yang kurang partisipatif, kurang transparan, atau kurang akuntabel berpotensi menghadapi persoalan legitimasi yang dapat memengaruhi keberlanjutan pelaksanaannya.

Legitimasi demokratis menjadi elemen yang menentukan sejauh mana masyarakat menerima dan mendukung kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Legitimasi tersebut tidak hanya dibangun melalui hasil pembangunan yang berhasil dicapai, tetapi juga melalui proses yang memberikan ruang bagi partisipasi, pengawasan, dan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dan demokrasi tidak seharusnya dipandang sebagai tujuan yang saling bertentangan. Keduanya justru perlu ditempatkan dalam hubungan yang saling memperkuat, di mana efektivitas pembangunan didukung oleh proses kebijakan yang demokratis, sementara demokrasi memperoleh makna yang lebih substantif melalui kemampuan negara menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

4. Menjaga Keseimbangan antara Pembangunan dan Demokrasi dalam Pembentukan Kebijakan

Meningkatnya orientasi pembangunan ekonomi dalam berbagai kebijakan negara menunjukkan bahwa kebutuhan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas investasi, dan meningkatkan daya saing nasional telah menjadi bagian penting dari agenda penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh proses pembentukan kebijakan tetap berjalan dalam koridor konstitusional serta menghormati prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi dasar kehidupan bernegara. Kedua tujuan tersebut pada dasarnya tidak berada dalam posisi yang saling meniadakan. Pembangunan ekonomi dan demokrasi merupakan dua unsur yang sama-sama diperlukan untuk mendukung keberlangsungan negara modern. Pembangunan yang berhasil membutuhkan stabilitas politik, legitimasi kebijakan, dan kepercayaan publik, sementara demokrasi yang berkualitas memerlukan kapasitas negara yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi bukanlah memilih salah satu di antara keduanya, melainkan bagaimana menempatkan pembangunan dan demokrasi dalam hubungan yang saling memperkuat.

Kebutuhan untuk menjaga keseimbangan tersebut semakin penting ketika kebijakan yang dibentuk berkaitan dengan kepentingan ekonomi strategis yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Kebijakan semacam ini sering kali lahir dari tuntutan untuk menjawab persoalan yang dianggap mendesak, seperti peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, penguatan industri nasional, atau pengembangan kawasan ekonomi tertentu. Dalam situasi demikian, pemerintah dihadapkan pada tekanan untuk menghasilkan keputusan yang cepat dan efektif. Namun, kecepatan dalam pengambilan keputusan tidak boleh dipahami sebagai alasan untuk mengurangi kualitas proses pembentukan kebijakan. Semakin besar

dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut memperoleh legitimasi melalui prosedur yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan ketentuan konstitusional.

Upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan demokrasi harus dimulai dari pemahaman bahwa tujuan pembangunan tidak dapat dipisahkan dari kerangka konstitusional yang mengatur penggunaan kekuasaan negara. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dasar pembentukan lembaga negara, tetapi juga menjadi pedoman yang menentukan bagaimana kewenangan negara digunakan dalam mencapai berbagai tujuan pembangunan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip-prinsip yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan. Sebaliknya, pencapaian tujuan pembangunan justru akan memperoleh legitimasi yang lebih kuat apabila dilakukan melalui proses yang menghormati ketentuan konstitusional. Dalam konteks ini, pembangunan dan konstitusionalitas bukanlah dua kepentingan yang bersaing, melainkan dua unsur yang harus berjalan secara bersamaan dalam pembentukan kebijakan publik.

Salah satu aspek yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tersebut adalah partisipasi masyarakat. Dalam berbagai pembahasan mengenai kualitas demokrasi, partisipasi sering dipandang sebagai mekanisme yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan memengaruhi kehidupan mereka. Kehadiran partisipasi tidak hanya berfungsi untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat legitimasi kebijakan yang dihasilkan (Prabowo, 2023). Ketika masyarakat memiliki kesempatan yang memadai untuk menyampaikan pandangan dan kepentingannya, kebijakan yang dibentuk cenderung memperoleh tingkat penerimaan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penguatan mekanisme partisipasi masyarakat menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan bahwa orientasi pembangunan ekonomi tidak mengurangi kualitas demokrasi dalam proses pembentukan kebijakan.

Dalam praktiknya, penguatan partisipasi masyarakat tidak selalu berarti memperpanjang proses pengambilan keputusan atau menciptakan hambatan bagi pelaksanaan pembangunan. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa ruang partisipasi yang tersedia benar-benar memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi secara substantif terhadap pembentukan kebijakan. Partisipasi yang hanya bersifat formal tanpa memberikan pengaruh yang nyata terhadap substansi kebijakan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap proses yang berlangsung. Oleh karena itu, kualitas partisipasi perlu menjadi perhatian utama dalam pembentukan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi strategis. Melalui partisipasi yang efektif, berbagai kepentingan yang berkembang di masyarakat dapat diidentifikasi sejak awal sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar sosial yang lebih kuat.

Selain partisipasi masyarakat, pengawasan juga merupakan elemen yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan demokrasi. Pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa penggunaan kewenangan negara tetap berada dalam batas-batas yang telah ditentukan dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks kebijakan ekonomi strategis, pengawasan menjadi semakin penting karena kebijakan yang dibentuk sering kali melibatkan penggunaan sumber daya negara dalam jumlah besar serta memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap pembangunan nasional. Tanpa pengawasan yang memadai, terdapat risiko bahwa orientasi pembangunan yang semula ditujukan untuk kepentingan publik dapat bergeser menjadi sarana yang lebih menguntungkan kelompok-kelompok tertentu.

Optimalisasi fungsi pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga negara, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat, media, akademisi, dan berbagai unsur lainnya yang memiliki perhatian terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Kehadiran berbagai bentuk pengawasan tersebut menciptakan mekanisme kontrol yang memungkinkan kebijakan

dievaluasi secara berkelanjutan. Melalui pengawasan yang efektif, pemerintah tidak hanya dituntut untuk mencapai target pembangunan, tetapi juga untuk mempertanggungjawabkan cara yang digunakan dalam mencapai target tersebut. Dengan demikian, pengawasan berperan sebagai instrumen yang menjaga agar efektivitas pembangunan tetap berjalan seiring dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan keterbukaan.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam proses pembangunan. Kebijakan ekonomi strategis sering kali dirancang untuk menghasilkan manfaat yang luas bagi masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, manfaat tersebut tidak selalu dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Dalam beberapa keadaan, terdapat kelompok-kelompok tertentu yang harus menghadapi konsekuensi langsung dari pelaksanaan kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan demokrasi memerlukan perhatian terhadap posisi kelompok-kelompok yang terdampak oleh kebijakan yang dibentuk. Perlindungan terhadap hak-hak warga negara menjadi penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak berlangsung dengan mengorbankan kepentingan masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan dari negara.

Perhatian terhadap perlindungan hak-hak warga negara juga memiliki hubungan yang erat dengan legitimasi kebijakan. Kebijakan yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang besar sekalipun dapat menghadapi resistensi apabila masyarakat merasa bahwa proses pembentukannya tidak memperhatikan kepentingan mereka. Sebaliknya, kebijakan yang dibentuk melalui proses yang terbuka dan memberikan perhatian terhadap hak-hak masyarakat cenderung memperoleh tingkat penerimaan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, legitimasi tidak hanya berasal dari keberhasilan mencapai hasil pembangunan, tetapi juga dari keyakinan masyarakat bahwa proses yang digunakan berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam negara demokratis.

Menjaga keseimbangan antara pembangunan dan demokrasi juga menuntut adanya kemampuan negara untuk mengelola berbagai kepentingan yang muncul dalam proses pembentukan kebijakan. Pembangunan ekonomi sering kali melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, masyarakat lokal, hingga kelompok-kelompok masyarakat sipil. Setiap aktor memiliki tujuan dan harapan yang tidak selalu sejalan satu sama lain. Oleh karena itu, pembentukan kebijakan memerlukan mekanisme yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan tersebut secara proporsional. Kemampuan untuk mengelola perbedaan kepentingan inilah yang menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam jangka panjang, keseimbangan antara pembangunan dan demokrasi akan menentukan keberlanjutan kebijakan yang dihasilkan oleh negara. Kebijakan yang hanya berorientasi pada pencapaian target ekonomi mungkin mampu menghasilkan manfaat dalam waktu yang relatif cepat, tetapi berpotensi menghadapi persoalan legitimasi apabila proses pembentukannya tidak memperoleh dukungan yang memadai dari masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi cenderung memiliki tingkat penerimaan yang lebih kuat sehingga lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang. Dengan demikian, pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan sumber daya ekonomi yang memadai, tetapi juga memerlukan fondasi demokrasi yang mampu mendukung pelaksanaan kebijakan secara konsisten.

E. KESIMPULAN

Pembentukan kebijakan berbasis kepentingan ekonomi strategis menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi telah menjadi salah satu pertimbangan utama dalam arah penyelenggaraan negara. Orientasi tersebut tercermin melalui peningkatan prioritas terhadap investasi, pembangunan infrastruktur, penguatan sektor-sektor strategis, serta berbagai

program nasional yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional. Dalam konteks tersebut, kebijakan negara tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempercepat pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kepentingan ekonomi strategis dan penentuan prioritas kebijakan negara, sehingga pertimbangan ekonomi semakin menempati posisi penting dalam proses pengambilan keputusan publik. Di sisi lain, semakin kuatnya orientasi pembangunan ekonomi menimbulkan kebutuhan untuk memastikan bahwa proses pembentukan kebijakan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Kesesuaian prosedur pembentukan kebijakan, keterlibatan masyarakat, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengawasan lembaga negara menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi kebijakan yang dihasilkan. Meskipun percepatan pembangunan sering kali dipandang sebagai kebutuhan untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi, proses tersebut tidak dapat mengesampingkan mekanisme yang menjamin kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, konstitusionalitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tujuan pembangunan yang hendak dicapai, tetapi juga oleh kualitas proses yang melandasi pembentukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, N., Taufiqurokhman, T., Fauzi, D. M., & Watriningsih, W. (2020). Kebijakan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di Era Disrupsi. *Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, 3(1), 24-39.
- Anwar, M. (2022). Green economy sebagai strategi dalam menangani masalah ekonomi dan multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343-356.
- Barizi, M. H., & Triarda, R. (2023). Rantai Pasokan Global Dan Nasionalisme Sumber Daya Alam: Kajian Terkait Hilirisasi Nikel di Indonesia. *Indonesian Journal of International Relations*, 7(2), 312-338.
- Harsoyo, H. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten Rembang. *Public Service and Governance Journal*, 1(01), 86-111.
- Heriyono, H. (2019). Orientasi Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Berdasarkan Pancasila. *Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat*, 19(2), 295-314.
- Jaya, B., Muhtar, E. A., & Darto, D. (2021). Perencanaan Strategis Pembangunan Desa Dalam Rangka Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 1061-1076.
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Maidiana, M., & Harahap, S. P. R. (2021). Pembuatan Keputusan Dalam Proses Manajemen Dan Aspek Manajemen. *Journal Ability: Journal of Education and Social Analysis*, 2(3).
- Maulana, A. (2019). Faktor-faktor pembentukan daerah otonomi baru dan dampaknya terhadap keuangan negara. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(2), 53-67.
- Maulana, A. (2021). The Human Capital in Revolution Industri. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Terapan*, 5, 1-8.
- Mulyana, A. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA): Sebuah Tinjauan HAM. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 19(1), 59-88.
- Nujum, S., & Rahman, Z. (2019). Pengaruh investasi dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di kota makassar. *Jurnal Economic Resource*, 2(1), 21-33.

- Pamungkas, T. K., & Jakfar, M. H. A. (2022). Efektivitas kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik. *Jurnal Paradigma Madani: Ilmu Sosial, Politik dan Agama*, 9(1), 13-24.
- Prabowo, N. (2023). Urgensi Pendidikan Demokrasi dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 865-871.
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., ... & Fasa, M. I. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Zahir Publishing.
- Sarfiah, S. N., Septiani, Y., & Sugiharti, R. R. (2023). Peran Kendal sebagai kawasan ekonomi khusus dalam transformasi ekonomi: analisis strategis dan implementasi melalui matriks SWOT. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 3(1), 47-65.
- Sari, C. D. P., & Ibrahim, H. (2023). Peran Politik dalam Pembentukan Kebijakan Perdagangan Internasional (Studi Perbandingan Antara Negara Maju dan Negara Berkembang). *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2464-2473.
- Septiana, A. R., Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., ... & Seran, D. A. N. (2023). Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi. *Global Eksekutif Teknologi*.
- Sepyah, S., Hardiyatullah, H., Hamroni, H., & Jayadi, N. (2022). Pengaruh partisipasi masyarakat desa dalam pembuatan kebijakan publik terhadap penguatan demokrasi desa. *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 2(2), 1-12.
- Setyaningrum, R. A., Trisiana, A., & Kirana, A. (2021). Geostrategi Indonesia melalui Pendekatan Kesejahteraandalam Konsepsi Ketahanan Nasional di Bidangekonomi. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 1-11.
- Sihite, A. H. (2022). Analisis perubahan pola konsumsi masyarakat dan implikasinya terhadap sektor perekonomian. *Jurnal Price: Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(01), 36-46.
- Sune, U. (2019). Kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato. *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(1), 117-144.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan efektivitas implementasi kebijakan publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25-36.
- Turot, Y. (2021). Implementasi Kebijakan Pembentukan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura: Potensi, Peluang Dan Tantangan. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 59-77.
- Umam, A. K. (2019). Lemahnya Komitmen Antikorupsi Presiden di tengah Ekspektasi Pembangunan Ekonomi dan Tekanan Oligarki. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 1-17.